

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Beberapa studi terdahulu dijadikan sebagai bahan pertimbangan studi ini, diantaranya:

Studi pertama, merupakan sebuah skripsi oleh Amanda Putri Wisuda yang mengambil judul “Analisis Pelaksanaan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Depok”, pada program Studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Indonesia Tahun 2012. Studi mengkaji kebijakan pelaksanaan perencanaan pembangunan taman kota, yang dituangkan dalam bentuk Masterplan, yang diatur Dinas kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Depok. Dengan menggunakan metodologi kualitatif, hasil studi menunjukkan bahwasannya tidak terdapat kebijakan rencana pembangunan dari taman kota di Depok dikarenakan belum diresmikan RTRW di Depok, adanya akurasi data yang rendah, rendahnya sosialisasi, keterbatasan dana, serta minim tenaga manusia.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni mempunyai fokus yang sama, yaitu Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Maka studi tersebut dapat dijadikan referensi bagi peneliti dalam memperdalam fokus studi. Serta terdapat perbedaan dari studi tersebut dengan

studi ini, yakni pada site atau wilayah tempat penelitian, yaitu di Kota Depok.  
Dimana kerangka berpikir dalam penelitian ini didasarkan pada masalah-masalah



kelingkungan yang mana seringkali ada dalam lingkup kota tersebut. Pemerintah kota sebagai pihak yang berwenang dalam urusan pemerintah daerah, berupa dalam meminimalisir permasalahan lingkungan tersebut, yaitu dengan membuat kebijakan. Satu diantara sekian kebijakan itu ialah penggunaan ruang terbuka hijau yang mampu mewujudkan kenyamanan, keamanan, keindahan wilayah, serta kesejahteraan kotasehingga mampu meminimalisir timbulnya permasalahan lingkungan tersebut. Dan Taman Kota merupakan sebuah produk dari RTH yang dianggap mampu memberikan pemecahan masalah kelingkungan melalui fungsi Taman Kota.

Penelitian kedua, merupakan sebuah Skripsi oleh Novita Pristiani yang mengambil judul “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bekasi”, pada Program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2013. Studi ini mengkaji terkait pengimplementasian kebijakan RTH, yang sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundangan untuk memenuhi kebutuhan RTH 30% dari luas wilayah kota. Melalui penerapan metode kualitatif deskriptif, studi ini memberi kesimpulan bahwasannya proporsi 30% RTH di Kota Bekasi sulit untuk di implementasikan karena keterbatasan lahan, ketidakkonsistenan pemerintah kota dalam merupakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), koordinasi dan sosialisasi yang kurang efektif, dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan penghijauan di lingkungan sekitar.

Keterbatasan lahan yang kerap menjadi permasalahan dalam pelaksanaan RTH memang menjadi permasalahan utama bagi pemerintah kota. Dikatakan

bahwa pemerintah Kota Bekasi dalam mengembangkan RTH baru sampai pada tahapan penataan taman yang disediakan dari proses penyerahan fasilitas sosial (fasos) yang disediakan swasta (pengembang). Menurut peraturan perundang yang diteapkan melalui Badan Perizinan, bahwa pihak swasta wajib menyerahkan 30% dari lahan mereka untuk digunakan fasum dan fasos. Namun masih banyak pihak swasta yang tidak memenuhi kewajiban tersebut. Begitu juga dengan permasalahan dalam mendirikan bangunan. Dikatakan bahwa proses perijinan mendirikan bangunan tidak begitu saja mendapatkan izin dari pemerintah kota. Bila tidak sesuai dengan ketentuan tentu tidak akan mendapatkan persetujuan. Namun pemerintah kota nampaknya belum konsisten terhadap ketentuan tersebut.

Studi tersebut mempunyai kesamaan dengan studi ini yakni dalam kajian penelitian berupa implementasi kebijakan serta site yaitu Kota Bekasi. Sehingga peneliti menggunakan penelitian ini sebagai referensi yang memungkinkan memandu peneliti. Dan perbedaan penelitian ini adalah fokus. bila peneliti lebih memfokuskan pada Taman Kota yang merupakan bentuk dari RTH, karena jenis RTH publik ini lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk beraktivitas, sehingga masyarakat yang merupakan sebagai sasaran dari program dalam pemeliharaan RTH tersebut dapat secara langsung memanfaatkannya dan ikut berpartisipasi dalam memelihara dan menjaga Taman Kota. Sedangkan pada penelitian ini memfokuskan dalam RTH publik yang mana pengelolaannya dinaungi di bawah pemda RTH privat yang pengelolaannya di kelola pribadi/kelompok tertentu. *Sumber: Diolah Peneliti*

## 2.2 Pengertian Kebijakan Publik

Pendefinisian terkait istilah kebijakan publik cukup bervariasi dengan penekanan yang berbeda. Berdasarkan pendapat William N. Dunn (Pasolong, 2013:39), kebijakan publik didefinisikan sebagai serangkaian pilihan yang dibentuk oleh lembaga bidang terkait dengan memiliki keterkaitan tugas dalam hal keamanan, pertahanan, kesehatan, energi, kesejahteraan penduduk, pendidikan, perkotaan, kriminalitas, dan sebagainya.

Sebagaimana pernyataan Thomas R. Dye (Rusdi, 2015:38), kebijakan suatu negara terkait dalam pilihan pemerintah dalam melaksanakan tindakan maupun tidak. Menurut pendefinisian ahli tersebut, diambil simpulan bahwasannya kebijakan publik didefinisikan sebagai pilihan dari pihak pemerintah dalam melaksanakan tindakan untuk mengentas masalah di tengah masyarakat dan meraih keperluan bersama.

Kebijakan publik dilakukan oleh pihak administrasi negara dibawah naungan tata laksana birokrasi pemerintah. Fokus kebijakan publik di negara maju ialah layanan publik yang dapat dilaksanakan negara dalam melakukan pertahanan maupun pengembangan kualitas maslahat masyarakat. Terminologi dari kebijakan publik mampu memperlihatkan pada seluruh tata laksana yang lebih tinggi dibanding aturan perundang-undangan yang melingkupi aspek struktur tata laksana serta anggaran. Daur kebijakan publik mampu dikaitkan dalam tindakan, tata laksana, serta pengevaluasian kebijakan. Kemudian, kontribusi publik di

masing-masing proses kebijakan dapat dijadikan tolok ukur level kepatuhan pemerintahan terhadap amanat dari rakyat.

Apabila kebijakan publik telah dibuat, maka perlu perlu untuk memahami agenda dibanding kebijakan, dalam artian permasalahan yang perlu diselesaikan dan menjadi prioritas, serta publik dibolehkan untuk memberi saran yang memberi pengaruh bagi kebijakan publik.

### **2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut rumusan Wahab (Anggara, 2012:530), implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan suatu kebijakan yang umumnya berwujud undang-undang aturan pemerintah, putusan dari peradilan, dekrit presiden, maupun perintah lembaga eksekutif. Menurut pendapat Van Meter & Van Horn (Rusdi, 2015:91), implementasi kebijakan didefinisikan sebagai suatu tindakan individu maupun kolektif pemerintah dan non-pemerintah untuk meraih tujuan sebagaimana perencanaan keputusan kebijakan.

Definisi umum implementasi kebijakan menurut Grindle (1980:7), implementasi ialah tindakan dalam lembaga administratif yang mampu diteliti dalam tingkat khusus dan dimulai jika target serta tujuan telah diresmikan. Aktivitas atau program akan dilaksanakan jika telah disusun serta terdapat dana yang tepat target. Apabila pemahaman difokuskan, kebijakan mampu diterapkan searah sebagaimana opini Van Meter & Van Horn (Parsons, 1995:461 ; Wibawa,

et al., 1994:15), bahwasannya implementasi kebijakan ialah tindakan kolektif maupun individu untuk meraih suatu tujuan.

Pemahaman terkait konsepsi implementasi menurut Lane diklasifikasikan di dua bagian yakni implementasi sebagai persamaan fungsi serta maksud. Serta, berdasarkan pernyataan di atas, yakni formula implementasi ialah fungsi yang mencakup maksud, tujuan, output, formator, inisiator, implementor, serta waktu (Sabatier, 1986: 21-48). Fokus dari dua fungsi ialah isi kebijakan yang hasilnya dari implementasi implementor di periode khusus.

## **2.4 Model-model Implementasi Kebijakan**

### **2.1.1 Model Donald Van Meter dan Carl Van Horn**

Model ini ialah abstraksi implementasi kebijakan yang secara fundamental sengaja dilaksanakan dalam mencapai performa implementasi kebijakan publik tinggi yang diproses terkait keterkaitan antarvariabel.<sup>4</sup> Beberapa variabel yang memberi pengaruh bagi pengimplementasian kebijakan publik, diantaranya:

#### **1. Tujuan serta Ukuran Kebijakan**

Performa dari pengimplementasian kebijakan mampu diukur level keberhasilan apabila dan hanya apabila tujuan serta ukuran kebijakan secara realistis ada dalam level tatalaksana kebijakan. Apabila tujuan maupun ukuran

---

<sup>4</sup> Budi Winarno, Kebijakan Publik “Teori, Proses, dan Studi Kasus”. (Yogyakarta: 2012)

kebijakan dianggap terlalu ideal untuk diimplementasikan maka cukup sulit dalam melakukan realisasi kebijakan agar meraih keberhasilan.

## 2. Sumber Daya

Proses implementasi dapat dikatakan berhasil apabila bergantung dari kemampuan pemanfaatan sumber daya salah satunya sumber daya manusia. Beberapa tahapan secara keseluruhan dari proses implementasi memberikan tuntutan terhadap sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi sebagaimana pekerjaan yang telah ditentukan oleh kebijakan. Apabila sumber daya manusia memiliki daya saing dan kemampuan yang rendah maka performa dari kebijakan publik dapat dikatakan sulit untuk meraih pengharapan. Disamping SDM, terdapat sumber daya lain yang dapat dipertimbangkan ya ini finansial dan waktu. Ketiganya diperlukan dalam model implementasi ini.

## 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Beberapa pihak yang nantinya akan ikut campur dalam melakukan implementasi kebijakan publik yakni organisasi informal maupun formal. Hal ini menjadi penting dikarenakan performa implementasi akan signifikan dipengaruhi dari karakteristik dari agen tata laksana. Disamping itu luasnya wilayah dari pengimplementasian kebijakan dapat dipertimbangkan untuk menetapkan agen tata laksana. Apabila lingkup implementasi kian meluas, maka agen yang terlibat perlu diluaskan pula.



#### 4. Sikap Kecenderungan (*disposition*)

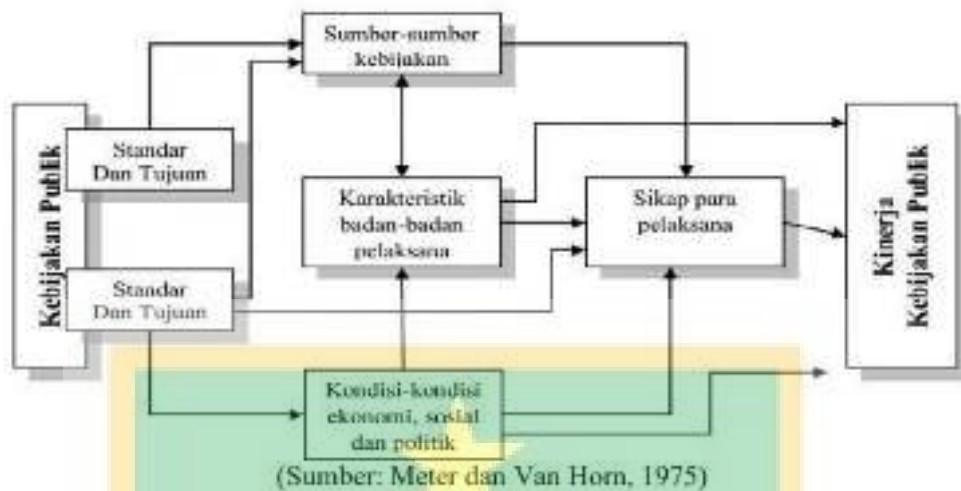
Pihak pelaksana perlu memiliki sikap penerimaan agar nantinya memberikan pengaruh signifikan terhadap keberhasilan maupun ketidakberhasilan performa pengimplementasian kebijakan. Hal ini memiliki peluang tinggi untuk terjadi dikarenakan kebijakan bukanlah merupakan output dari penggabungan formulasi masyarakat yang memahami permasalahan yang ada, tetapi pelaksanaan kebijakan oleh implementor yakni kebijakan dari atas yang mana para pemutus kebijakan umumnya tidak mengetahui bagaimana keinginan maupun kebutuhan yang terjadi di tengah masyarakat.

#### 5. Aktivitas Pelaksana serta Komunikasi Antar Organisasi

Koordinasi ialah serangkaian proses yang signifikan dalam tahapan implementasi kebijakan. Apabila koordinasi serta komunikasi kian baik diantara para pihak, maka akan meminimalisir kesalahan dalam prosesnya.

#### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Pertimbangan terakhir dalam performa implementasi kebijakan ialah besarnya dorongan atau dukungan dari lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik. Apabila lingkungan eksternal dalam kondisi yang tidak kondusif maka mampu menjadi suatu faktor dari tingginya kegagalan performa implementasi. Sehingga upaya dalam melakukan implementasi kebijakan perlu memperhatikan situasi kondusif dari lingkungan luar.



**Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn**

### 2.1.2 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Edward III (Nugroho, 2009:636), menyatakan bahwasannya permasalahan utama dalam administrasi publik ialah rendahnya pemerhatian terhadap proses implementasi. Model ini mengarahkan pada pemerhatian dari 4 isu utama dari pengimplementasian kebijakan agar bersifat efektif, yakni:

1. Proses Komunikasi. Apabila komunikasi terjalin kian efektif diantara implementor serta target kelompok, maka kebijakan mampu dilakukan secara efektif.
2. Kebijakan perlu di didorong oleh berbagai sumber daya utamanya sumber daya finansial dan manusia.
3. Diposisi, yakni karakteristik dari pihak pelaksana kebijakan.

4. Struktur birokrat, yakni struktur birokrasi dalam proses pengimplementasian, terdapat dua aspek utama yakni mekanisme serta struktur organisasi tata laksana.

### 2.1.3 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Kerangka pemikiran ini didasarkan atas jawaban dua pertanyaan utama, yakni kesuksesan implementasi dari level implementability kebijakan yakni konteks dan konten.

1. Isi kebijakan yang melingkupi beberapa hal, diantaranya:

- a) Kepentingan yang berkaitan yakni kepentingan target kelompok dari isi kebijakan.
- b) Jenis kebermanfaatan yang nantinya akan diterima target kelompok.
- c) Tingkat keinginan terjadinya perubahan dari suatu kebijakan.
- d) Titik ketepatan dari pengambilan keputusan dari suatu program.
- e) Pelaksana suatu kebijakan secara detail.
- f) Dukungan dari berbagai sumber daya yang memenuhi.

2. konteks pengimplementasian yang mencakup beberapa hal, yakni:

- a) Kepentingan, kekuasaan, serta strategi keterlibatan aktor
- b) Karakteristik dari rezim serta lembaga kuasa
- c) Respons serta kepatuhan pelaksana

Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di kota Jakarta Selatan, peneliti memilih model implementasi kebijakan milik Donald van Meter dan Carl van Horn (1975). Model tersebut

menunjukkan tidak hanya kondisi internal implementor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi, namun kondisi eksternal, yaitu lingkungan sosial, ekonomi, serta politik mampu memberi pengaruh bagi tahapan implementasi. Keenam variabel yang dikemukakan Van Mter dan Van Horn mempunyai keterkaitan dari keseluruhan yang kompleks.

## 2.5 Ruang Terbuka Hijau

Menurut pendapat Hakim & Utomo (2004), ruang terbuka didefinisikan sebagai ruang yang mampu diakses masyarakat dalam periode tertentu maupun tidak terbatas waktu yang berwujud trotoar, jalan, RTH, dan sebagainya.

Cakupan ruang terbuka ialah Ruang Terbuka Hijau serta ruang terbuka lain yang berwujud area tanpa bangunan. Ruang terbuka ialah ruang di suatu wilayah yang luas dalam wujud wilayah atau jalur yang mana pemanfaatannya bersifat terbuka. Ruang terbuka mencakup RTH maupun ruang terbuka non-hijau.

Dalam UU RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang terbuka hijau ialah suatu area jalur maupun berkelompok yang pemanfaatannya terbuka serta dapat ditanami berbagai tumbuhan secara alami maupun buatan. RTH ialah proses ekologis sebagaimana pengendali ameliorasi iklim, pencemaran udara, tata kendali air, dan lain-lain.

Ruang terbuka hijau (RTH) ialah sebuah keperluan yang terkait erat dengan penataan ruang. RTH ialah keperluan yang menjadi suatu faktor penting

dalam penataan wilayah khususnya daerah dengan pemukiman padat, sebagaimana yang menjadi salah satu fungsinya sebagai estetika atau sarana keindahan. Suatu daerah tidak bisa begitu saja melupakan lingkungan yang bersih, asri, dan nyaman, tanpa adanya perpoohonan serta tanaman-tanaman. Spreigen (dalam Sugandhy & Hakim, 2009:103) menyatakan bahwa:

“RTH Kota ialah bagian tak terpisahkan dari perkotaan yang tidak terdapat bangunan untuk mendukung kesejahteraan, kenyamanan, serta pengembangan kualitas lingkungan kota.” Oleh sebab itu, penting sekali untuk daerah permukiman padat untuk menyediakan dan meningkatkan RTH.

Kawasan perkotaan merupakan kawasan yang dapat dikatakan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Citra perkotaan yang di anggap lebih maju, membuat banyak orang khususnya daeri daerah-daerah kecil, untuk berpindah bermukim ke kota. Wirth (dalam Koestoer, 2001:109) merumuskan bahwa kota ialah pemukiman besar, permanen, serta padat oleh penduduk dengan heterogen.

Sebagaimana yang tercantum dalam pasal (1), Peraturan Mendagri RI Nomor 1 Tahun 2007, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) ialah suatu bagian dari ruang terbuka kota yang mencakup tumbuhan maupun tanaman guna pemanfaatan lingkungan, ekonomi, sosial-budaya, serta keindahan. Dalam aspek fungsi lingkungan, RTH memiliki fungsi untuk menjamin sistem kesegaran udara di perkotaan, sarana aturan iklim dalam kota untuk memperlancar udara secara alami, sebagai produsen gas oksigen, peneduh dan penyerapan hujan, habitat satwa dan sebagainya. Dalam aspek sosial budaya, RTH mampu

memberikan gambaran terkait pengekspresian budaya Kota sebagai salah satu media komunikasi warga, area rekreasi, objek penelitian maupun pendidikan. Dalam fungsi sosial, RTH lampu dijadikan sebagai sarana olahraga maupun permainan, atau area istirahat.

Dalam aspek perekonomian, RTH lampu dijadikan sebagai sumber produk untuk penjualan serta sebagai bagian terikat dengan usaha perkebunan maupun pertanian masyarakat. Dalam aspek estetika atau keindahan, RTH mampu memberikan keindahan dan kenyamanan di lingkungan perkotaan, serta memberikan stimulasi dukungan tingkat produktivitas maupun kreativitas masyarakat dalam membentuk keindahan serta suasana yang seimbang di wilayah tersebut. Selain itu, pembangunan RTH memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung dari RTH ialah menciptakan suasana kenyamanan maupun keindahan kota. Sedangkan manfaat tidak langsung berupa dukungan sirkulasi udara yang segar dan sehat, mendukung pemeliharaan air tanah di lingkungan perkotaan, serta pelestarian lingkungan.

## **2.6 Taman Kota**

Taman kota ialah area terbuka dalam luasan yang relatif dengan paduan tumbuhan maupun pepohonan serta bahan kreasi lainnya yang digunakan sebagai salah satu tempat untuk berolahraga, bermain, maupun santai. Taman kota ialah Salah satu wujud dari adanya RTH. Sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008, beberapa kegiatan lain diantaranya aktivitas pendidikan, rekreasi, dan sebagainya di tingkat perkotaan. Ssebuah kota dianggap

perlu dalam membangun taman kota, selain sebagai sarana sosial masyarakat untuk rekreasi, berkumpul, dan berkomunikasi, taman kota menggambarkan mungkin, bukan hanya untuk menarik warga setempat, namun warga atau pendatang dari daerah-daerah lain.

Selain bentuk ruang terbuka lainnya, taman kota juga perlu mendapat prioritas dari pemerintah. Pemerintah perlu menetapkan alokasi lahan yang dikhususkan untuk pembangunan taman kota, terutama pada kawasan pusat-pusat kota. Adanya pengalokasian lahan untuk diwujudkan sebagai taman kota bertujuan untuk memberikan sebuah wilayah yang terbuka sehingga memberi peluang adanya sirkulasi udara dalam lingkungan. Taman kota dapat dijadikan sebagai tempat keberlangsungan lingkungan hayati maupun nonhayati.

Pembangunan taman kota diharapkan memiliki luas wilayah setidaknya kurang lebih 5 (lima) hektar. Taman-taman kecil yang tersebar tidak akan efektif bagi ekosistem perkotaan. Bukan hanya karena keragaman hayati tidak bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat, tetapi juga akan memberikan beban pemeliharaan yang lebih sulit. Pembangunan taman kota bukan tanpa adanya fungsi dan tujuan yang dapat dirasakan. Ada banyak fungsi dan tujuan yang bermanfaat bagi kawasan kota itu sendiri maupun masyarakat setempat, diantaranya sebagai berikut.

**Tabel 5.**

**Fungsi dan Tujuan Taman Kota**

<b>Fungsi</b>	<b>Tujuan</b>
1. Fungsi untuk kesehatan	1. Sebagai sarana keindahan/estetika
2. Fungsi untuk keindahan	2. Mengurangi pencemaran
3. Taman sebagai daya tarik	3. Peredan kebisingan
4. Taman sebagai penunjuk arah	4. Memperbaiki iklim mikro
5. Taman sebagai penyaring debu	5. Sebagai daerah resapan
6. Taman sebagai peredam suara	6. Penyangga sistem kehidupan
7. Taman sebagai peneduh	7. Kenyamanan

(Sumber USU Homepage <http://repository.usu.ac.id> & Perpustakaan UI <http://lib.ui.ac.id/>)

Menurut pendapat Shvoong (2008), ada dua jenis taman yakni taman aktif dan taman pasif. Taman aktif mempunyai fungsi untuk tempat bermain dengan dukungan elemen permainan seperti ayunan maupun patung. Sedangkan taman pasif berwujud elemen keindahan demi menjaga keindahan lingkungan. (USU Homepage <http://repository.usu.ac.id/>).



## 2.7 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pendapat Fuad & Nugroho (2012:72), kerangka pemikiran dari suatu penelitian memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan terkait logika pola pikir dalam suatu studi dan hampir sama terhadap desain penelitian. Kerangka teoritik bukanlah titik keberangkatan atau dijadikan landasan dalam melakukan analisis fenomena ilmiah. Kerangka penelitian dalam suatu proposal penelitian dapat dimodifikasi apabila telah terjun di lapangan terkait penemuan lapangan dan penemuan teori keterbaruan.

Dalam studi Implementasi Kebijakan Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau di Kota Jakarta Selatan dengan berdasarkan pada ketentuan UU RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Pemda Jakarta Selatan untuk melakukan kebijakan mengarah terhadap peraturan Menteri PU Nomor 5 Tahun 2008. Dalam peraturan perundang-undangan ini berisikan bahwa wilayah kota berkewajiban memenuhi RTH minimal 30% dari keseluruhan luas daerah dan pembagian tersebut 20% untuk RTH publik sedangkan 10% untuk RTH privat.

Pada studi ini, peneliti memfokuskan pada objek RTH publik. Dimana dalam kepemilikan dan pengelolaannya, dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan beragam jenis bentuk dari RTH publik, peneliti mempersempit ruang lingkup pada RTH Taman, dan untuk mengetahui secara lebih mendetail maka peneliti membatasi dan mengambil salah satu bentuk dari RTH Taman, yaitu Taman Kota.

Taman Kota bersifat lebih luas, karena bertujuan memberi layanan terhadap masyarakat perkotaan dan dikembangkan pada kawasan pusat-pusat

pelayanan kota. Dilengkapi dengan fasilitas yang dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi semua kalangan. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan studi kasus pada Taman Aktif. Alasan peneliti, karena pada kategori taman ini terdapat fasilitas-fasilitas yang mendukung aktivitas dan kegiatan masyarakat. Bermain, olahraga, kegiatan sosial, maupun kegiatan lainnya yang bersifat aktif, sehingga taman ini banyak dikunjungi oleh masyarakat.

Di kota Jakarta Selatan 20 (dua puluh) taman yang dikategorikan sebagai Taman Aktif. Dan dari daftar taman tersebut, peneliti mengambil 3 (tiga) taman yang menjadi studi kasus penelitian yaitu Taman Barito, Taman Mataram dan Taman Langsung. Dimana ketiga taman tersebut merupakan taman kota yang banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menjalani aktivitas dan kegiatannya, terlebih lagi fungsi taman disesuaikan dengan tema taman.

Peneliti melakukan observasi awal, yaitu dengan secara langsung mendatangi ketiga taman tersebut dan juga melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait. Dan berdasarkan observasi tersebut, peneliti mengidentifikasi dua permasalahan sebagai berikut. Pertama keterbatasan lahan dan anggaran sehingga menyebabkan sulitnya bagi Pemerintah Daerah Jakarta Selatan dalam menambah jumlah RTH dan Taman Kota. Kedua, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk peduli dalam menjaga dan merawat Taman Kota.

Studi ini menerapkan model implementasi berdasarkan teori Model Van Meter & Van Norn (Agustino, 2008: 141-144). Teori tersebut mempunyai enam variabel yang memberi pengaruh bagi proses pengimplementasian kebijakan,

yakni sumber daya, tujuan dan standar kebijakan, sikap pelaksana, karakteristik agen implementor, komunikasi serta aktivitas, dan lingkungan eksternal.

Pelaksanaan pembangunan dan penataan Taman Kota, saat ini menjadi fokus Pemerintah Daerah Kota Jakarta. Karena membantu dalam meningkatkan RTH publik, sebagaimana yang menjadi target pemerintah daerah dalam memenuhi RTH publik 30%. Disamping itu, menambah estetika Kota Jakarta dan menyadarkan masyarakat untuk peduli pada lingkungan. Agar memudahkan pemahaman alur pemikiran peneliti, berikut akan digambarkan kerangka berpikir penelitian.



**Tabel 6. Kerangka Berpikir Penelitian**



